

ketentuan berlaku. Dalam hal ini BPBD Wonogiri mendukung mobilisasi sumber daya. Untuk pengakhiran dilakukan oleh Kepala BPBD Wonogiri dengan membuat rencana pengakhiran dengan Surat Perintah (SPRINT) Pengakhiran. Selanjutnya Komando Tanggap Darurat Bencana dibubarkan sesuai waktu dengan SK Pembubaran.

Proses tanggap darurat dinyatakan selesai dengan adanya pernyataan resmi Gubernur/Bupati/Walikota. Dengan selesainya tanggap darurat maka fungsi Pos Komando Tanggap Darurat kembali ke Pusdalops, dan tugas *Incident Commander* (IC) menjadi selesai, serta semua sumberdaya kembali ke posisi semula/sumbernya. Tahap upaya PB selanjutnya adalah masuk ke dalam masa transisi ke proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta kehidupan/kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sudah mulai berjalan.

Dalam setiap kegiatan harus ada evaluasi dan pelaporan. Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan membuat rencana kegiatan hari selanjutnya. Hasil evaluasi menjadi bahan laporan harian kepada Kepala BPBD Wonogiri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi/Lembaga terkait. Untuk pelaporan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut (1) Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam penanganan darurat bencana wajib melaporkan kepada Kepala BPBD Wonogiri sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, (2) Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumberdaya manusia, jenis dan jumlah peralatan/logistik, serta sumberdaya lainnya termasuk sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel, (3) Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus, dan laporan insidentil pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD Wonogiri dengan tembusan kepada instansi/ lembaga/organisasi terkait, dan (4) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati Kabupaten Wonogiri dan Kepala BNPB, Kepala BNPB melaporkan kepada Presiden.

#### **4.3. Pasca Bencana**

Tahapan ini merupakan tahapan setelah terjadi atau setelah dianggap selesainya suatu bencana. Tahapan ini meliputi 2 hal utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. **Rehabilitasi** adalah Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama Normalisasi / berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. **Rekonstruksi** adalah Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta

kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat dengan sasaran utama Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan Pasca Bencana yaitu:

1. Sektor Perumahan & Permukiman
2. Sektor Infrastruktur Publik
3. Sektor Ekonomi Produktif
4. Sektor Sosial, dan
5. Lintas Sektor

Untuk melaksanakan program Rehabilitasi & Rekonstruksi dengan 5 (lima) sektor yang menjadi kewenangan, bidang RR menggunakan metode Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/ Jitupasna yang tercantum pada Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011. Jitupasna merupakan suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek – aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan.

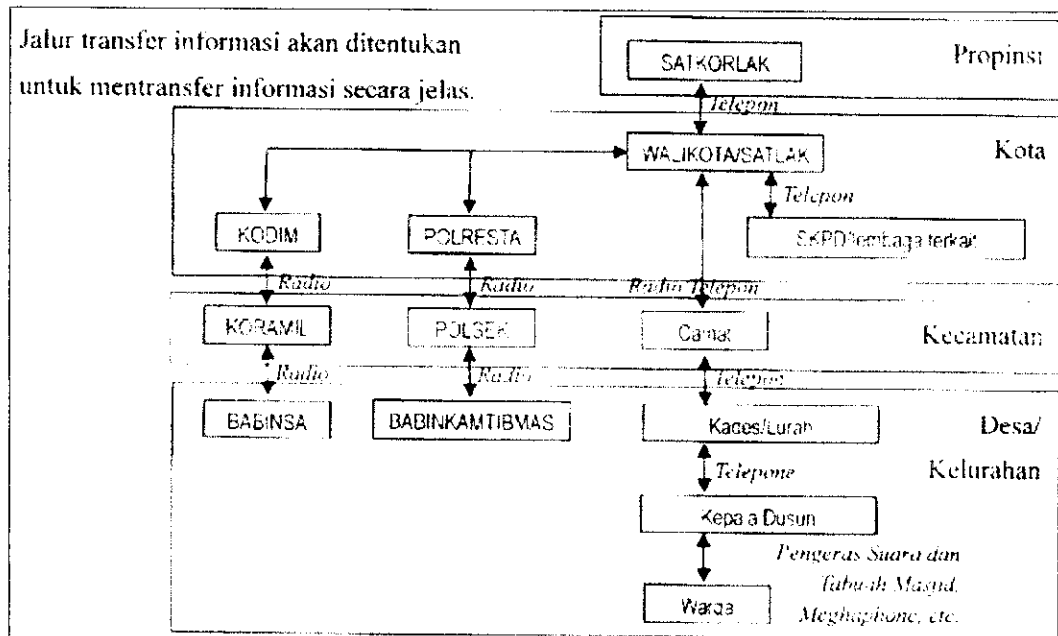
Guna mendukung program/ kegiatan yang dilaksanakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi diperlukan sumber dana yang cukup. Merujuk pada PP nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pelaksanakan Program Rehabilitasi & Rekonstruksi bersumber pada:

1. APBD Kabupaten/ Kota (Melekat Pada SKPD terkait)
2. APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah)
3. APBN (Hibah Murni)
4. Masyarakat
5. Bantuan Luar Negeri

#### **4.4. Mekanisme Penanggulangan Bencana**

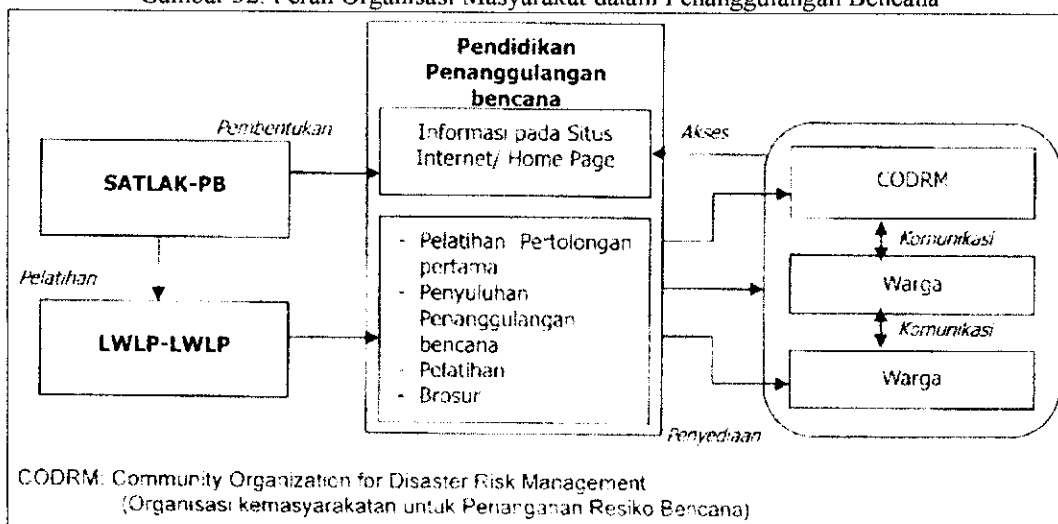
Mekanisme penanggulangan bencana selain dilakukan berdasarkan Komando Tanggap Darurat Bencana juga dilakukan di semua bagian BPBD, bagian Pemerintahan, serta di semua bagian masyarakat. Hierarki jalur mekanisme penanggulangan bencana dijelaskan pada Gambar 31 berikut:

Gambar 31. Hierarki Jalur Mekanisme Penanggulangan Bencana



Berdasarkan hierarki tersebut, jalur-jalur antar pemerintahan menjadi jelas dan terstruktur. Hierarki tersebut dimaksudkan agar dapat membantu dan mengefisiensikan kerja pada saat bencana hingga dapat turun ke bagian masyarakat. Di lapangan, SATLAK (Satuan Pelaksana) juga memiliki andil besar dalam penanganan. Organisasi masyarakat kaitannya dengan ini juga dibutuhkan tenaga dan dukungannya, berikut merupakan pentingnya pendidikan penanggulangan bencana di organisasi masyarakat.

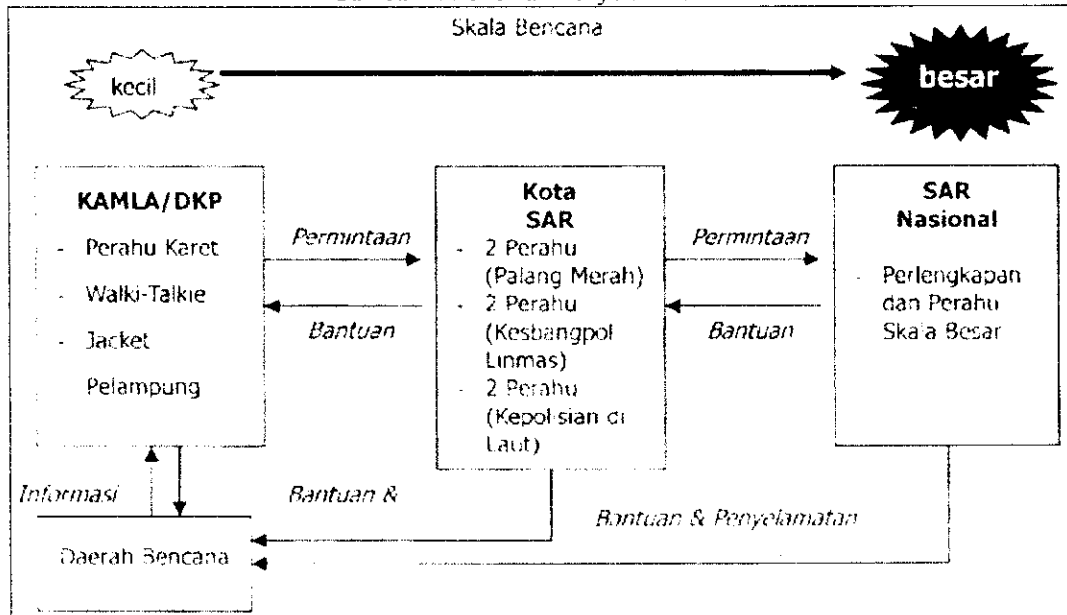
Gambar 32. Peran Organisasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana



Di Kabupaten Wonogiri sendiri bencana yang paling sering terjadi adalah Longsor, Banjir, Kekeringan, dan yang menjadi preventif yaitu Tsunami. Dari

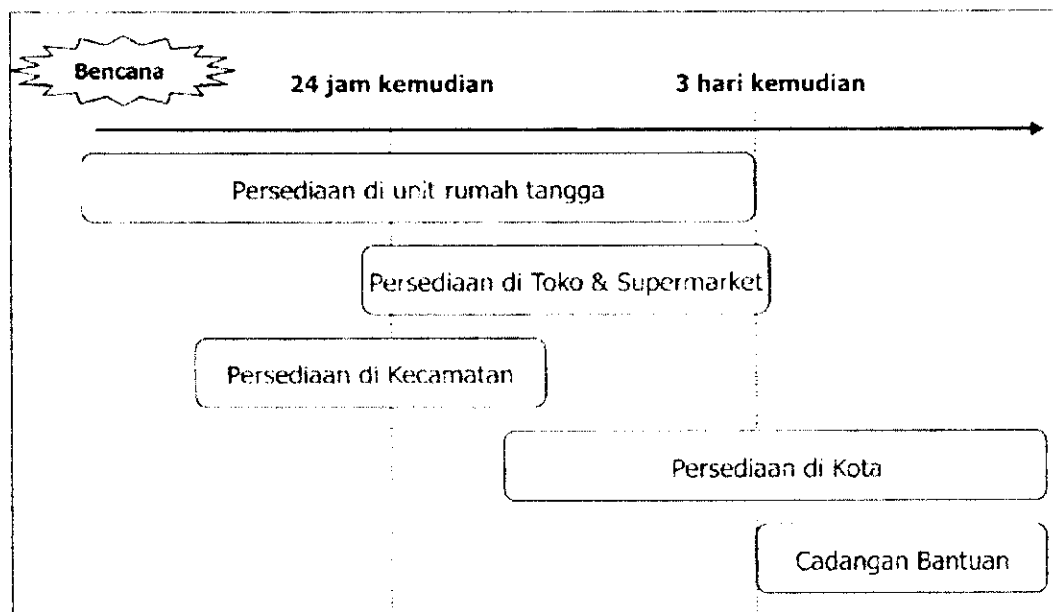
bencana-bencana tersebut dapat dikategorikan bencana darat dan air. Penyelamatannya pun juga dapat dikategorikan menjadi penyelamatan darat dan air. Penyelamatan jalur darat mengacu pada jalur evakuasi bencana. Sedangkan berikut merupakan skema penyelamatan air.

Gambar 33. Skema Penyelamatan Air



Hal yang tidak kalah penting adalah mekanisme persediaan, jaringan persediaan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh korban. Berikut merupakan skema persediaan yang harus diperhatikan selain oleh korban namun juga oleh pemberi bantuan.

Gambar 34. Skema Persediaan



Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri. Dapat diketahui ada beberapa point penting

yang digunakan untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi. Adapun beberapa point yang ada dapat diketahui sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kabupaten Wonogiri terhadap pengurangan resiko bencana

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kabupaten Wonogiri terhadap pengurangan resiko bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 31. Sasaran Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kabupaten Wonogiri terhadap pengurangan resiko bencana

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2016/2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	4 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa
2	Jumlah masyarakat Tangguh Bencana yang dibentuk/dilatih	1.160 Org	1.160 Org	1.160 Org	1.160 Org	1.160 Org
3	Jumlah Dokumen PB yang disusun	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Sumber: Dokumen RENSTRA BPBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya penanggulangan bencana.

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya penanggulangan bencana yang dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 32. Sasaran Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya penanggulangan bencana

No	Sasaran	Tahun				
		2016/2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Relawan PB yang dibentuk	240 org	120 org	120 org	120 org	120 org
2	Jumlah SDM Penanggulangan Bencana yang handal/terlatih	230 org	230 org	230 org	230 org	230 org

Sumber: Dokumen RENSTRA BPBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

3. Meningkatkan keandalan penanganan darurat bencana

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan keandalan penanganan darurat bencana selama 5 tahun ke depan. Dalam sasaran yang akan dicapai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 33. Sasaran Peningkatan keandalan penanganan darurat bencana

No	Sasaran	Tahun				
		2016/2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sarana dan Prasarana PB yang tersedia	16 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis

Sumber: Dokumen RENSTRA BPBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 34. Sasaran mewujudkan pemenuhan kebutuhan logistik PB

No	Sasaran	Tahun				
		2016/2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Logistik PB yang tersedia	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis

Sumber: Dokumen RENSTRA BPBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

5. Memulihkan daerah terdampak bencana menjadi lebih baik

Sasaran yang ingin dicapai dalam memulihkan daerah terdampak bencana menjadi lebih baik selama 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 35. Sasaran memulihkan daerah terdampak bencana menjadi lebih baik

No	Sasaran	Tahun				
		2016/2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokumen penyusunan dokumen yang tersusun	4 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
2	Jumlah dampak bencana yang tertangani		10 paket	5 paket	5 paket	5 paket

Sumber: Dokumen RENSTRA BPBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

**5.1. Kegiatan-kegiatan****5.1.1. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan**

1. Percepatan penyusunan aturan tertulis Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Wonogiri.
2. Perkuatan kapasitas BPBD Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Analisis Risiko Bencana untuk proyek-proyek pembangunan besar.
3. Perkuatan Pusdalops PB yang tangguh.

**5.1.2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu**

1. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dapat diakses oleh setiap pemangku kepentingan lintas batas dan lintas sector
2. Membangun fasilitas pusat data informasi kebencanaan daerah
3. Membangun Sistem Peringatan Dini Daerah yang terintegrasi
4. Mengembangkan layanan sosial bagi masyarakat rentan di daerah pengampu

**5.1.3. Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan**

1. Pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur
2. Penyelenggaraan sekolah siaga bencana
3. Diklat manajemen bencana
4. Penyediaan bantuan pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana sesuai dengan jenjang pendidikan

**5.1.4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat**

1. Fasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana daerah
2. Penyediaan dukungan partisipasi sektor industri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Fasilitasi pembentukan desa tangguh dalam membangun budaya pengurangan risiko bencana
4. Penguatan cadangan pangan
5. Pemberdayaan lumbung pangan

6. Workshop/temu kemitraan antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan dengan BUMN dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Bencana
7. Pengembangan Kampung siaga Bencana

### 5.1.5. Perlindungan Masyarakat dari Bencana dan Penanganan Bencana

#### 5.1.5.1. Program pada Tiap Jenis Bencana

Tabel 36. Jenis Kegiatan pada Masing-masing Bencana

Jenis Bencana	Daerah Berisiko Tinggi	Kegiatan
Tsunami	Paranggupito	Budidaya Tanaman Mangrove dan Terumbu Karang di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Tsunami
		Alokasi dan pemindahan masyarakat yang berada di Zona Prioritas PB bencana Tsunami ke daerah aman
		Pengadaan / Penentuan Gedung Penyelamatan / Pengungsian untuk masyarakat di Zona Prioritas bencana Tsunami
		Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
		Pembuatan dan Pemasangan Jalur Evakuasi di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Banjir
Banjir	Baturetno	Perbaikan jaringan utama irigasi dan bendungan
	Eromoko	Pengadaan Pintu Air Terintegrasi
	Giriwoyo	Reklamasi sungai
	Jatiroto	Pembuatan sumur resapan
	Jatisrono	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	Kismantoro	Pembersihan Daerah Aliran Sungai secara berkala dan partisipaif
	Ngadirojo	Sosialisasi dan Latihan Berkala Kesiapsiagaan Banjir
	Ngutoronadi	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir (contoh: Perahu karet, pelampung, dll)
	Pracimantoro	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjir
	Purwantoro	Pembuatan dan Pemasangan Jalur Evakuasi Banjir
	Selogiri	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
	Sidoharjo	
	Wonogiri	
Wuryantoro		
Kekeringan	Eromoko	Suplai air bersih yang terkoordinasi dengan baik
	Giritontro	Perbaikan jaringan utama irigasi, waduk dan bendungan, serta sumur dalam
	Manyaran	Mengawasi fungsi kawasan hutan- hutan lindung dan hutan-hutan konservasi di wilayah berisiko kekeringan
	Paranggupito	Sosialisasi tentang Kesiapsiagaan Kekeringan dan pencegahan bencana kekeringan
	Pracimantoro	
Longsor	Eromoko	Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup terkait tata guna lahan, serta rehabilitasi lahan



Jenis Bencana	Daerah Ber-risiko Tinggi	Kegiatan
	Karangtengah	Alokasi dan pemindahan masyarakat yang berada di Zona Prioritas PB Longsor
	Kismantoro	Peningkatan Kapasitas Daerah Resapan di Zona Prioritas PB berisiko longsor
	Manyaran	Pembangunan sistem peringatan dini di zona prioritas PB Longsor
	Tirtomoyo	Peningkatan Kapasitas Prasarana dan Sarana Evakuasi Masyarakat pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Longsor

Sumber: Analisi data tahun 2017

#### 5.1.5.2. Penanganan Bencana

Isi kegiatan dari penanganan bencana ini antara lain:

- a. Kajian Cepat Bencana
- b. Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- d. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
- e. Pengkajian kerusakan dan kerugian
- f. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi
- g. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
- h. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

## 5.2. Pelaku Kegiatan

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Wonogiri merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Peran dan fungsi pemerintah di tingkat daerah serta instansi yang ada di Kabupaten Wonogiri dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): mengkoordinasi, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana, serta melakukan monitoring dan evaluasi pasca-bencana
2. Badan Kepegawaian Daerah: menyusun kebutuhan SDM aparatur Penanggulangan Bencana
3. Dinas Lingkungan Hidup: mengendalikan pencemaran limbah dan dampak yang ditimbulkan oleh limbah tersebut, serta turut melakukan pengendalian tata ruang yang mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
4. Dinas Kearsipan: arsip penanggulangan bencana.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan: mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang peka risiko bencana bersama dengan dinas-dinas terkait
6. Dinas Sosial: merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik untuk korban bencana
7. Dinas Kesehatan: merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan: menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana
9. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata: merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah yang terkenan bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana; membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait budaya dan pariwisata
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: membantu menyiapkan gedung-gedung pendidikan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian sementara
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; membantu mencatat korban jiwa / kejadian melahirkan pada saat bencana
12. Dinas Pertanian dan Pangan; membantu menyediakan cadangan pangan dan hasil pertanian untuk pengungsi bencana
13. Dinas Komunikasi dan Informatika; membantu melancarkan proses komunikasi dan informasi pada saat bencana
14. Dinas Pekerjaan Umum: merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana fisik dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana fisik
15. Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan: merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai
16. Dinas Perhubungan: merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informasi
17. Dinas Tenaga Kerja: membangun dan mengembangkan lapangan kerja padat karya bagi masyarakat terdampak bencana

18. Satuan Polisi Pamong Praja: melakukan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah saat terjadi bencana, serta mendukung kesiapan relawan penanggulangan bencana.
19. Rumah Sakit Umum Daerah: membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait layanan kesehatan.
20. Tentara Nasional Indonesia (TNI); membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap korban, lokasi dan kerusakan, pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
21. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort dan Sektor di Kabupaten Wonogiri; membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, pemulihan keamanan dan ketertiban.
22. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan: membantu dalam bidang penyiapan data-data pertanahan
23. PMI; memberikan bantuan medis pada kondisi darurat bencana.

### **5.3. Sumber Dana**

Penghitungan anggaran pada pagu indikatif kegiatan penanggulangan bencana mengikuti sebuah strategi penganggaran yang membagi penganggaran penanggulangan bencana menjadi dua bagian. Anggaran pertama merupakan anggaran periodik yang merupakan pembebanan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan anggaran kedua adalah anggaran khusus untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana.

Anggaran pertama dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa sebelum bencana terjadi. Anggaran kedua dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa darurat dan pemulihan bencana. Anggaran ini disesuaikan dengan anggaran *on call* (siap pakai). Bila dari hasil kajian cepat bencana diperoleh bahwa anggaran penanganan dan pemulihan bencana melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah, maka rekomendasi status darurat bencana nasional akan direkomendasikan kepada Kepala BNPB.

**BAB VI. PENUTUP**

Penyusunan Dokumen Resiko Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Wonogiri yang disusun ini merupakan salah satu mekanisme efektif untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana. Pelaksanaan Dokumen RPB Kabupaten Wonogiri membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Wonogiri hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Wonogiri dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Wonogiri.

 **BUPATI WONOGIRI**

